



INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



# RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025



## **KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 telah selesai disusun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., MH.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680606 198903 1 011

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

.....	
1	
1.1 Latar Belakang	
.....	
1	
1.2 Landasan Hukum	
.....	
1	
1.3 Maksud dan Tujuan	
.....	
3	
1.4 Sistematika Penulisan	
.....	
4	

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

.....	
5	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sukoharjo .....	5
2.2 Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	
.....	
13	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	
.....	
16	

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.....

.....	17
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo .....	18
3.3 Tantangan dan Peluang .....	19

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....**

20

**BAB V PENUTUP ..... 21**

**Lampiran :**

**Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunandaerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH PADA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo
- 2.2. Kajian Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukoharjo
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sukoharjo
- 3.3. Tantangan dan Peluang Inspektorat Kabupaten  
Sukoharjo

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI**  
**RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah kabupaten Sukoharjo adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat dilihat dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil perencanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat dilihat dalam Rekapitulasi Evaluasi berikut ini :



6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra	dokumen	2	10.000.000	2	11.270.000	2	11.270.000	0	-	0	-	0	-	2	11.270.000	100%	100%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0,8	1.530.000	0,1	270.000	0,1	138.900	1	1.938.900	100%	97%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA Perubahan SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0,8	175.000	0,1	1.600.000	0,1	195.000	1	1.970.000	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0	-	0,85	1.665.000	0,15	305.000	1	1.970.000	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Perubahan SKPD	dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0,1	675.000	0,8	1.100.000	0,1	49.000	1	1.824.000	100%	91%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP	laporan	2	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0,5	900.000	0,3	600.000	0,2	425.000	1	1.925.000	100%	96%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan kinerja keuangan Perangkat Daerah	%	100	5.158.551.000	100	6.856.952.000	25	919.003.092	25	2.329.298.235	25	1.446.764.704	25	1.590.114.458	100	6.285.180.489	100%	92%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang dilayani	orang	38	5.041.266.000	38	6.719.687.000	38	889.003.092	38	2.298.398.235	38	1.410.184.204	38	1.551.308.658	38	6.148.894.189	100,00%	91,51%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelola keuangan	orang	12	111.285.000	12	131.265.000	3	30.000.000	6	30.000.000	9	33.172.000	6	37.500.000	24	130.672.000	100%	100%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan	laporan	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0	-	0,7	1.215.000	0,3	613.000	1	1.828.000	100%	91%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Triwulanan	laporan	12	2.000.000	4	2.000.000	0	-	2	900.000	1	627.500	1	303.800	4	1.831.300	100%	92%



6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pengadaan sarana prasarana perkantoran	%	100	300.000.000	100	270.820.000	0	0	15	31.800.000	0	0	85	231.000.000	100	262.800.000	100%	97%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor	jenis	4	300.000.000	1	270.820.000	0	-	1	31.800.000	0	-	0	231.000.000	1	262.800.000	100%	97%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang perkantoran	%	100	115.000.000	100	104.308.000	18	15.953.092	7	11.872.540	50	42.463.079	25	22.770.310	100	93.059.021	100%	89%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang dikelola	buah	800	15.000.000	800	9.000.000	200	594.000	200	421.000	200	2.600.000	200	3.083.000	800	6.698.000	100%	74%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL	orang	3	100.000.000	2	95.308.000	1	15.359.092	1	11.451.540	1	39.863.079	1	19.687.310	4	86.361.021	100%	91%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	250.000.000	100	180.750.000	30	43.318.500	25	33.789.121	30	58.664.313	15	43.828.200	100	179.600.134	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	unit	7	200.000.000	7	155.750.000	2	35.518.500	1	30.409.121	3	55.809.313	1	33.989.300	7	155.726.234	100%	100%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	unit	40								0		0					
6	01	6-1	0-0	0-0	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor yang dipelihara	unit	25	50.000.000	15	25.000.000	8	7.800.000	4	3.380.000	3	2.855.000	0	9.838.900	15	23.873.900	100%	95%



6	01	6-1	0-0	0-0	01	03			Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Cakupan Tugas Mandatory APIP dalam Kebijakan Pemerintahan	%	100	800.000.000	100	801.345.000	25	136.825.000	25	154.347.500	25	205.538.800	25	294.052.799	100	790.764.099	100%	99%
																									0			
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase dokumen kebijakan pengawasan tersusun tepat waktu	%	100	100.000.000	100	263.525.000	25	22.500.000	25	50.247.500	25	54.713.500	25	132.584.500	100	260.045.500	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	PKPT	dokumen	1	50.000.000	1	112.315.000	0	-	0,2	1.775.000	0,2	7.350.000	0,6	102.284.500	1	111.409.500	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kegiatan fasilitasi pengawasan	kegiatan	3	50.000.000	2	151.210.000	0,2	22.500.000	0,3	48.472.500	0,5	47.363.500	1	30.300.000	2	148.636.000	100%	98%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perangkat Daerah yang menjadi obyek pendampingan	%	100	700.000.000	100	537.820.000	25	114.325.000	25	104.100.000	25	150.825.300	25	161.468.299	100	530.718.599	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah asistensi dan pendampingan	kegiatan	2	75.000.000	2	56.300.000	1	8.425.000	0	-	1	11.384.800	0	35.386.500	2	55.196.300	100%	98%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.02	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah yang dinilai	OPD	10	75.000.000	10	15.500.000	0	-	0	-	10	7.252.500	0	8.047.500	10	15.300.000	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi saberpungli	kegiatan	4	450.000.000	4	461.520.000	1	105.900.000	1	104.100.000	1	127.958.000	1	117.774.299	4	455.732.299	100%	99%
6	01	6-1	0-0	0-0	01	03	2.02	04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Survey penilaian integritas	kegiatan	1	100.000.000	1	4.500.000	0	-	0	-	1	4.230.000	0	260.000	1	4.490.000	100%	100%

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Pemulihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi;
4. Pembangunan infrastruktur daerah; dan
5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Sesuai isu strategis tersebut, tugas Inspektorat terkait dengan isu tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah dan sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Untuk mewujudkan visi-misi Bupati terpilih yaitu dengan Visi “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur” serta Inspektorat Daerah mendukung pencapaian misi yang pertama yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi”

Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional melalui penguatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai berikut : Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dengan indikator sasaran :

1. Level Maturitas SPIP : Tingkat 3
2. Level Kapabilitas APIP : Level 3

### **3.3. TANTANGAN DAN PELUANG**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki tantangan serta peluang sebagai berikut :

1. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan belum berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2023 = B), sehingga tantangan ke depan terhadap SAKIP Kabupaten Sukoharjo masih harus berbenah untuk dapat meningkatkan nilai tersebut.
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP

diharapkan menunjukkan progres yang menggembirakan.

3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah mendapatkan penilaian dari BPKP dengan berada pada tingkat 3 dengan catatan, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi.
4. Level Kapabilitas APIP di Tahun 2023 sudah mendapat level 3.
5. Keterbatasan jumlah fungsional APIP yang masih jauh dari ideal, dimana sesuai hasil analisa jabatan yang telah disusun dibutuhkan 42 fungsional APIP, tetapi jumlah ketersediaan baru 27 orang.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SUKOHARJO**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 terdapat 3 Program, 11 kegiatan dan 38 sub kegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja. Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., MH.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680606 198903 1 011

**USULAN BELANJA DAERAH**

RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

*(Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer)*

Urusan Pemerintahan & Bidang Urusan : 

6
---

 : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Perangkat Daerah : 

6	1	1
---	---	---

 : INSPEKTORAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN, BIDANG URUSAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN							APBD 2024	APBD 2025					KETR.
								B.OPERASI	B.MODAL	B. TIDAK TERDUGA	B.TRANSFER	JUMLAH	
1							3	4a	4b	4c	4d	4 = (4a+4b+4c+4d)	5
<b>CONTOH</b>													
6		6.01.0.00.0.00.01.00				<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>11.766.582.000</b>	<b>11.559.642.000</b>	<b>206.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.766.582.000</b>	
						<b>INSPEKTORAT</b>	<b>11.766.582.000</b>	<b>11.559.642.000</b>	<b>206.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.766.582.000</b>	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>Sumber dana :</b>
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.985.000	22.000.000					
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.925.000					DAU
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.025.000					



6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.08	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.08	4
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	1
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	6
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2		
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	1
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	2
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	3
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	4
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	5
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	6
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	7
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.02	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.02	1
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.02	2
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3		
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.01	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.01	1

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.220.000	74.312.000			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.750.000	155.750.000			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000	40.000.000			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>					
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>					
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	149.310.000	149.400.000			
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	408.000.000	413.550.000			
Reviu Laporan Kinerja	24.210.000	25.440.000			
Reviu Laporan Keuangan	70.890.000	70.950.000			
Pengawasan Desa	240.020.000	240.080.000			
Kerjasama Pengawasan Internal	580.464.000	732.242.000			
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	98.160.000	249.000.000			
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>					
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.500.000	11.250.000			
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	238.500.000	238.700.000			
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>					
<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>					
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	125.550.000	193.700.000			

6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	167.550.000	133.810.000						
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.00</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>								
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58.005.000	52.200.000						
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22.810.000	18.440.000						
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	569.752.000	589.512.000						
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57.840.000	36.512.000						
		<b>JUMLAH</b>												